

EXPOSURE DRAFT

STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

Exposure Draft ini diterbitkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia.

Tanggapan atas *Exposure Draft* ini diharapkan dapat
diterima paling lambat tanggal 23 September 2016.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



Exposure Draft ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran dan masukan untuk menyempurnakan *exposure draft* dimungkinkan sebelum diterbitkannya Standar Akuntansi Keuangan.

Tanggapan tertulis atas *exposure draft* paling lambat diterima pada **23 September 2016**.

Tanggapan dikirimkan ke:

**Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia**

Grha Akuntan, Jalan Sindanglaya No 1, Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 3190-4232 Fax: (021) 390-0016

E-mail: dsak@iaiglobal.or.id, iai-info@iaiglobal.or.id.

Hak Cipta © 2016 Ikatan Akuntan Indonesia

Exposure Draft dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. Penggunaan *exposure draft* oleh individu/organisasi/lembaga dianjurkan dan diizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.

PENGANTAR

Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah menyetujui *Exposure Draft Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah* (“ED SAK EMKM”) dalam rapatnya pada tanggal 18 Mei 2016 untuk disebarluaskan dan ditanggapi oleh perusahaan, regulator, perguruan tinggi, pengurus dan anggota IAI, dan pihak lainnya.

Tanggapan akan sangat berguna jika memaparkan permasalahan secara jelas dan alternatif saran yang didukung dengan alasan. ED SAK EMKM ini disebarluaskan dalam bentuk buku, sisipan dokumen dalam majalah Akuntan Indonesia, dan situs IAI: www.iaiglobal.or.id.

Jakarta, 18 Mei 2016
Dewan Standar Akuntansi Keuangan

Djohan Pinnarwan	Ketua
Danil S. Handaya	Wakil Ketua
Patricia	Anggota
Lianny Leo	Anggota
Teguh Supangkat	Anggota
I.B. Aditya Jayaantara	Anggota
P.M. John L. Hutagaol	Anggota
Kristianto Andi Handoko	Anggota
Indra Wijaya	Anggota
Singgih Wijayana	Anggota
Friso Palilingan	Anggota
Ersa Tri Wahyuni	Anggota

PERMINTAAN TANGGAPAN

Penerbitan ED SAK EMKM bertujuan untuk meminta tanggapan atas seluruh pengaturan dan paragraf dalam ED SAK EMKM tersebut.

Untuk memberikan panduan dalam memberikan tanggapan, berikut ini hal yang diharapkan masukannya:

1. Ruang Lingkup (Bab 1)

ED SAK EMKM memberikan definisi ruang lingkup entitas mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam Paragraf 1.1 – 1.3.

Apakah Anda setuju dengan ruang lingkup sebagaimana diusulkan dalam Bab 1 ED SAK EMKM ini? Jika tidak, apa alasan Anda?

2. Asumsi Dasar (Bab 2)

ED SAK EMKM mensyaratkan tiga asumsi dasar yang harus dipenuhi oleh entitas dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan ED SAK EMKM, yakni asumsi dasar akrual, kelangsungan usaha, dan konsep entitas bisnis.

Apakah Anda setuju dengan ketiga asumsi dasar sebagaimana diusulkan dalam Bab 2 ED SAK EMKM ini? Jika tidak, apa alasan Anda?

3. Laporan Keuangan Lengkap (Bab 3)

ED SAK EMKM mensyaratkan bahwa laporan keuangan minimum terdiri dari:

- a. Laporan posisi keuangan pada akhir periode;
- b. Laporan laba rugi selama periode;
- c. Catatan atas laporan keuangan, yang berisi tambahan dan rincian akun-akun tertentu yang relevan.

Apakah Anda setuju dengan laporan keuangan minimum sebagaimana diusulkan dalam Bab 3 ED SAK EMKM ini? Jika tidak, apa alasan Anda?

4. Kebijakan Akuntansi, Estimasi, dan Kesalahan (Bab 7)

ED SAK EMKM dalam Paragraf 7.4. menyebutkan bahwa “Jika ED SAK EMKM tidak secara spesifik mengatur perlakuan akuntansi atas suatu transaksi, peristiwa, atau keadaan lainnya, maka entitas hanya mengacu pada dan mempertimbangkan definisi, kriteria pengakuan, dan konsep pengukuran untuk aset, liabilitas, penghasilan, dan beban, serta prinsip pervasif dalam Bab 2 *Konsep dan Prinsip Pervasif* ED SAK EMKM ini. Entitas tidak mempertimbangkan pengaturan lain di luar pengaturan dalam ED SAK EMKM untuk transaksi, peristiwa, atau keadaan lain tersebut.”

*Apakah Anda setuju bahwa entitas tidak mempertimbangkan pengaturan lain di luar pengaturan yang ada dalam Bab 7 untuk transaksi, peristiwa, atau keadaan lain yang tidak diatur secara spesifik dalam ED SAK EMKM ini?
Jika tidak, apa alasan Anda?*

5. Aset dan Liabilitas Keuangan (Bab 8)

Bab 8 tentang *Aset dan Liabilitas Keuangan* mengatur prinsip-prinsip pengakuan, pengukuran, penghentian pengakuan, dan penyajian aset dan liabilitas keuangan.

*Apakah Anda setuju dengan perlakuan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan sebagaimana diusulkan dalam Bab 8 ED SAK EMKM ini?
Jika tidak, apa alasan Anda?*

6. Persediaan (Bab 9)

Bab 9 tentang *Persediaan* mengatur prinsip-prinsip pengakuan, pengukuran, dan penyajian persediaan.

*Apakah Anda setuju dengan perlakuan akuntansi atas persediaan sebagaimana diusulkan dalam Bab 9 ED SAK EMKM ini?
Jika tidak, apa alasan Anda?*

7. Investasi pada Ventura Bersama (Bab 10)

Bab 10 tentang *Investasi pada Ventura Bersama* mengatur pengukuran dan penyajian investasi pada ventura bersama.

*Apakah Anda setuju dengan perlakuan akuntansi atas investasi pada ventura bersama sebagaimana diusulkan dalam Bab 10 ED SAK EMKM ini?
Jika tidak, apa alasan Anda?*

8. Aset Tetap (Bab 11)

Bab 11 tentang *Aset Tetap* mengatur prinsip-prinsip pengakuan, pengukuran, penghentian pengakuan, dan penyajian aset tetap, termasuk tanah dan bangunan yang dimiliki untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau untuk keduanya.

*Apakah Anda setuju dengan perlakuan akuntansi atas aset tetap sebagaimana diusulkan dalam Bab 11 ED SAK EMKM ini?
Jika tidak, apa alasan Anda?*

9. Aset Takberwujud (Bab 12)

Bab 12 tentang *Aset Takberwujud* mengatur prinsip-prinsip pengakuan, pengukuran, penghentian pengakuan, dan penyajian untuk aset takberwujud yang diperoleh secara terpisah. Bab 12 ini tidak diterapkan untuk aset takberwujud yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha normal entitas.

*Apakah Anda setuju dengan perlakuan akuntansi atas aset takberwujud sebagaimana diusulkan dalam Bab 12 ED SAK EMKM ini?
Jika tidak, apa alasan Anda?*

10. Pendapatan dan Beban (Bab 14)

Bab 14 tentang *Pendapatan dan Beban* mengatur prinsip-prinsip pengakuan, pengukuran, dan penyajian pendapatan dan beban.

*Apakah Anda setuju dengan perlakuan akuntansi atas pendapatan dan beban sebagaimana diusulkan dalam Bab 14 ED SAK EMKM ini?
Jika tidak, apa alasan Anda?*

11. Pajak Penghasilan (Bab 15)

Bab 15 tentang *Pajak Penghasilan* mengatur pengakuan dan pengukuran pajak penghasilan.

*Apakah Anda setuju dengan perlakuan akuntansi atas pajak penghasilan sebagaimana diusulkan dalam Bab 15 ED SAK EMKM ini?
Jika tidak, apa alasan Anda?*

12. Transaksi dalam Mata Uang Asing (Bab 16)

Bab 16 tentang *Transaksi dalam Mata Uang Asing* mengatur pengakuan dan pengukuran transaksi dalam mata uang asing.

*Apakah Anda setuju dengan perlakuan akuntansi atas transaksi dalam mata uang asing sebagaimana diusulkan dalam Bab 16 ED SAK EMKM ini?
Jika tidak, apa alasan Anda?*

13. Ketentuan Transisi (Bab 17)

Bab 17 tentang *Ketentuan Transisi* mengatur bagaimana entitas menyusun laporan keuangannya pada saat tanggal transisi.

*Apakah Anda setuju dengan ketentuan transisi sebagaimana diusulkan dalam Bab 17 ED SAK EMKM ini?
Jika tidak, apa alasan Anda?*

14. Tanggal Efektif (Bab 18)

ED SAK EMKM diusulkan untuk berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018 dengan penerapan dini dianjurkan.

*Apakah Anda setuju dengan tanggal efektif dan ketentuan penerapan dini sebagaimana diusulkan dalam Bab 18 ED SAK EMKM ini?
Jika tidak, apa alasan Anda?*

15. Contoh Ilustratif dan Dasar Kesimpulan

Contoh ilustratif dan Dasar Kesimpulan melengkapi ED SAK EMKM namun bukan merupakan bagian dari ED SAK EMKM.

*Apakah Anda setuju bahwa contoh ilustratif dan dasar kesimpulan bukan merupakan bagian dari ED SAK EMKM ini?
Jika tidak, apa alasan Anda?*

IKHTISAR RINGKAS

Exposure Draft Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (ED SAK EMKM) disusun untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah (seterusnya disebut sebagai “entitas”) sebagaimana dideskripsikan dalam Bab 1 *Ruang Lingkup*.

ED SAK EMKM ditujukan untuk digunakan oleh entitas yang tidak atau belum mampu memenuhi persyaratan akuntansi yang diatur dalam SAK ETAP. ED SAK EMKM tidak memberikan definisi dan kriteria kuantitatif entitas mikro, kecil, maupun menengah. Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat digunakan sebagai acuan dalam mendefinisikan dan memberikan rentang kuantitatif tersebut.

ED SAK EMKM disusun berdasarkan topik dan dinyatakan dalam Bab 1 sampai dengan Bab 18. Jika referensi silang ke bab atau paragraf lain dilakukan, maka referensi silang tersebut hanya berlaku di antara bab-bab di dalam ED SAK EMKM ini.

Dalam ED SAK EMKM, laporan keuangan entitas disusun menggunakan asumsi dasar akrual dan kelangsungan usaha, sebagaimana yang digunakan oleh entitas selain entitas mikro, kecil, maupun menengah, serta menggunakan konsep entitas bisnis. Laporan keuangan entitas terdiri dari: (a) laporan posisi keuangan, (b) laporan laba rugi, dan (c) catatan atas laporan keuangan.

ED SAK EMKM dilengkapi dengan Contoh Ilustratif Laporan Keuangan. Entitas dapat menggunakan Contoh Ilustratif Laporan Keuangan sebagai panduan untuk mempermudah dan mendapatkan pemahaman dalam penyusunan laporan keuangannya.

ED SAK EMKM berlaku efektif tanggal 1 Januari 2018, namun penerapan dini dianjurkan.

DAFTAR ISI

- Bab 1 Ruang Lingkup**
- Bab 2 Konsep dan Prinsip Pervasif**
- Bab 3 Penyajian Laporan Keuangan**
- Bab 4 Laporan Posisi Keuangan**
- Bab 5 Laporan Laba Rugi**
- Bab 6 Catatan atas Laporan Keuangan**
- Bab 7 Kebijakan Akuntansi, Estimasi, dan Kesalahan**
- Bab 8 Aset dan Liabilitas Keuangan**
- Bab 9 Persediaan**
- Bab 10 Investasi pada Ventura Bersama**
- Bab 11 Aset Tetap**
- Bab 12 Aset Takberwujud**
- Bab 13 Liabilitas dan Ekuitas**
- Bab 14 Pendapatan dan Beban**
- Bab 15 Pajak Penghasilan**
- Bab 16 Transaksi dalam Mata Uang Asing**
- Bab 17 Ketentuan Transisi**
- Bab 18 Tanggal Efektif**

Contoh Ilustratif Laporan Keuangan Entitas

Dasar Kesimpulan

BAB 1 RUANG LINGKUP

RUANG LINGKUP *EXPOSURE DRAFT* STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (“ED SAK EMKM”)

1.1. ED SAK EMKM dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas mikro, kecil, dan menengah.

1.2. Entitas mikro, kecil, dan menengah adalah entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, sebagaimana didefinisikan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, setidaknya selama dua tahun berturut-turut.

1.3. ED SAK EMKM dapat digunakan oleh entitas yang tidak memenuhi definisi dan kriteria dalam paragraf 1.2, jika otoritas mengizinkan entitas tersebut untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan ED SAK EMKM.

BAB 2 KONSEP DAN PRINSIP PERVASIF

TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

2.1. Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut. Pengguna tersebut meliputi penyedia sumber daya bagi entitas seperti kreditor maupun investor. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

POSISI KEUANGAN

2.2. Informasi posisi keuangan entitas terdiri dari informasi mengenai aset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada tanggal tertentu, dan disajikan dalam laporan posisi keuangan. Unsur-unsur tersebut didefinisikan sebagai berikut:

- (a) Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan yang dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh oleh entitas.
- (b) Liabilitas adalah kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi.
- (c) Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitasnya.

Aset

2.3. Manfaat ekonomi masa depan suatu aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap arus kas kepada entitas. Arus kas tersebut dapat timbul dari penggunaan maupun pelepasan aset.

2.4. Beberapa aset memiliki wujud, sementara beberapa aset tidak memiliki wujud (tak berwujud). Namun demikian, wujud aset tidak esensial untuk menentukan keberadaan aset.

Liabilitas

2.5. Karakteristik esensial dari liabilitas adalah bahwa entitas memiliki kewajiban saat ini untuk bertindak atau untuk melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu. Kewajiban dapat berupa kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif. Kewajiban hukum dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak mengikat atau peraturan perundangan. Kewajiban konstruktif adalah kewajiban yang timbul dari tindakan entitas ketika:

- (a) oleh praktik baku masa lalu, kebijakan yang telah dipublikasikan atau pernyataan kini yang cukup spesifik, entitas telah memberikan indikasi kepada pihak lain bahwa entitas akan menerima tanggung jawab tertentu; dan
- (b) akibatnya, timbul ekspektasi kuat dan sah dari pihak lain bahwa entitas akan melaksanakan tanggung jawab tersebut.

2.6. Penyelesaian kewajiban saat ini biasanya melibatkan pembayaran kas, penyerahan aset selain kas, pemberian jasa, dan/atau penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban lain. Kewajiban juga dapat diselesaikan dengan cara lain, seperti kreditor membebaskan atau membatalkan haknya.

Ekuitas

2.7. Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitasnya. Klaim ekuitas adalah klaim atas hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitasnya. Klaim ekuitas merupakan klaim terhadap entitas, yang tidak memenuhi definisi liabilitas.

KINERJA

2.8. Informasi kinerja keuangan entitas terdiri dari informasi mengenai penghasilan dan beban selama periode pelaporan, dan disajikan dalam laporan laba rugi. Unsur-unsur tersebut didefinisikan sebagai berikut:

- (a) Penghasilan (*income*) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas masuk atau kenaikan aset, atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.
- (b) Beban (*expenses*) adalah penurunan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas keluar atau penurunan aset, atau kenaikan liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak disebabkan oleh distribusi kepada penanam modal.

2.9. Pengakuan penghasilan dan beban dalam laporan laba rugi dihasilkan secara langsung dari pengakuan aset dan liabilitas. Kriteria pengakuan penghasilan dan beban dibahas lebih lanjut dalam paragraf 2.24 dan 2.25.

Penghasilan

2.10. Penghasilan (*income*) meliputi pendapatan (*revenues*) dan keuntungan (*gains*).

- (a) Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang normal, yang dikenal dengan berbagai sebutan, misalnya: penjualan, imbalan, bunga, dividen, royalti, dan sewa.
- (b) Keuntungan mencerminkan akun lain yang memenuhi definisi penghasilan namun tidak

termasuk dalam kategori pendapatan, misalnya: keuntungan dari pelepasan aset.

Beban

2.11. Beban mencakup beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang normal dan kerugian.

- (a) Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang normal meliputi, misalnya, beban pokok penjualan, upah, dan penyusutan.
- (b) Kerugian mencerminkan akun lain yang memenuhi definisi beban namun tidak termasuk dalam kategori beban yang timbul dari pelaksanaan aktivitas entitas yang normal, misalnya: kerugian dari pelepasan aset.

PENGAKUAN UNSUR-UNSUR LAPORAN KEUANGAN

2.12. Pengakuan unsur laporan keuangan merupakan proses pembentukan suatu akun dalam laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi yang memenuhi definisi suatu unsur sebagaimana diuraikan dalam paragraf 2.2 dan 2.8, dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- (a) manfaat ekonomi yang terkait dengan pos tersebut dapat dipastikan akan mengalir ke dalam atau keluar dari entitas; dan
- (b) akun tersebut memiliki biaya yang dapat diukur dengan andal.

Manfaat Ekonomi Masa Depan

2.13. Kriteria pengakuan mengacu pada saat dapat dipastikan bahwa manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan akun tersebut akan mengalir ke dalam atau keluar dari entitas. Pengkajian derajat ketidakpastian yang melekat pada aliran manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang terkait dengan kondisi yang tersedia pada akhir periode pelaporan saat penyusunan laporan keuangan. Penilaian itu dibuat secara individu untuk akun-akun yang signifikan secara individual dan secara kelompok dari suatu populasi besar untuk akun-akun yang tidak signifikan secara individual.

Keandalan Pengukuran

2.14. Kriteria kedua untuk pengakuan suatu pos adalah adanya biaya yang dapat diukur dengan andal. Dalam banyak kasus, biaya suatu akun dapat diukur dengan andal. Dalam kasus lainnya, biaya tersebut harus diestimasi. Jika pengukuran yang layak tidak mungkin dilakukan, maka akun tersebut tidak diakui dan tidak disajikan dalam laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi.

PENGUKURAN UNSUR-UNSUR LAPORAN KEUANGAN

2.15. Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui aset, liabilitas, penghasilan, dan beban di dalam laporan keuangan.

2.16. Dasar pengukuran unsur laporan keuangan dalam ED SAK EMKM adalah biaya historis. Biaya historis suatu aset adalah sebesar jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Biaya historis suatu liabilitas adalah sebesar jumlah kas atau setara kas yang diterima atau jumlah kas yang diperkirakan akan dibayarkan untuk memenuhi liabilitas dalam pelaksanaan usaha normal.

MATERIALITAS

2.17. Relevansi informasi dipengaruhi oleh hakikat dan materialitasnya. Kelalaian untuk mencantumkan (*omission*) atau kesalahan dalam mencatat (*misstatement*) akun-akun laporan keuangan adalah material jika, baik secara sendiri maupun bersama, dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan. Materialitas bergantung pada ukuran dan sifat dari kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat tersebut dengan memperhatikan keadaan terkait. Ukuran atau sifat dari pos laporan keuangan atau gabungan dari keduanya dapat menjadi faktor penentu.

PRINSIP PENGAKUAN DAN PENGUKURAN PERVASIF

2.18. Persyaratan untuk pengakuan dan pengukuran aset, liabilitas, penghasilan, dan beban dalam ED SAK EMKM didasarkan pada konsep dan prinsip pervasif dari *Rerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan*. Dalam hal tidak ada suatu pengaturan tertentu dalam ED SAK EMKM untuk transaksi atau peristiwa lain, maka entitas mempertimbangkan definisi, kriteria pengakuan dan konsep pengukuran untuk aset, liabilitas, penghasilan, dan beban di dalam Bab 2 ini.

ASUMSI DASAR

Dasar Akrua

2.19. Entitas menyusun laporan keuangan dengan menggunakan dasar akrua. Dalam dasar akrua, akun-akun diakui sebagai aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban ketika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk masing-masing akun-akun tersebut.

Kelangsungan Usaha

2.20. Pada saat menyusun laporan keuangan, manajemen menggunakan ED SAK EMKM dalam membuat penilaian atas kemampuan entitas untuk melanjutkan usahanya di masa depan (kelangsungan usaha). Entitas mempunyai kelangsungan usaha, kecuali jika manajemen bermaksud melikuidasi entitas tersebut atau menghentikan operasi atau tidak mempunyai alternatif realistis kecuali melakukan hal-hal tersebut. Jika entitas tidak menyusun laporan keuangan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, maka entitas mengungkapkan fakta mengapa entitas tidak mempunyai kelangsungan usaha.

Konsep Entitas Bisnis

2.21. Entitas menyusun laporan keuangan berdasarkan konsep entitas bisnis. Entitas bisnis, baik yang merupakan usaha perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, maupun badan usaha yang berbadan hukum, harus dapat dipisahkan secara jelas dengan pemilik bisnis tersebut maupun dengan entitas-entitas lainnya. Transaksi yang berkaitan dengan bisnis tersebut harus dapat dipisahkan dari transaksi pemilik bisnis tersebut, maupun dari transaksi entitas lainnya.

PENGAKUAN DALAM LAPORAN KEUANGAN

Aset

2.22. Aset diakui dalam laporan posisi keuangan ketika manfaat ekonominya di masa depan dapat dipastikan akan mengalir ke dalam entitas dan aset tersebut memiliki biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset tidak diakui dalam laporan posisi keuangan jika manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir ke dalam entitas walaupun pengeluaran telah terjadi. Sebagai alternatif, transaksi tersebut menimbulkan pengakuan beban dalam laporan laba rugi.

Liabilitas

2.23. Liabilitas diakui dalam laporan posisi keuangan jika pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dipastikan akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban entitas dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur secara andal.

Penghasilan

2.24. Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan kenaikan aset atau penurunan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

Beban

2.25. Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau kenaikan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

SALING HAPUS

2.26. Saling hapus antara aset dan liabilitas atau penghasilan dan beban tidak diperkenankan, kecuali disyaratkan atau diizinkan oleh ED SAK EMKM.

2.27. Jika aktivitas normal entitas tidak termasuk membeli dan menjual aset tetap, maka entitas melaporkan keuntungan dan kerugian atas pelepasan aset tetap tersebut dengan mengurangi hasil penjualan aset tetap dari jumlah tercatat aset tetap dan beban penjualan terkait.

BAB 3 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

RUANG LINGKUP

3.1. Bab ini menjelaskan penyajian wajar dari laporan keuangan sesuai persyaratan ED SAK EMKM dan pengertian laporan keuangan yang lengkap untuk entitas.

PENYAJIAN WAJAR

3.2. Penyajian wajar mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa, dan kondisi lain yang sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, liabilitas, penghasilan, dan beban yang dijelaskan dalam Bab 2 *Konsep dan Prinsip Pervasif*. Pengungkapan diperlukan ketika kepatuhan atas persyaratan tertentu dalam ED SAK EMKM tidak memadai bagi pemakai untuk memahami pengaruh dari transaksi, peristiwa, dan kondisi lain atas posisi dan kinerja keuangan entitas.

3.3. Penyajian wajar laporan keuangan mensyaratkan entitas untuk menyajikan informasi untuk mencapai tujuan:

- (a) relevan: informasi dapat digunakan oleh pengguna untuk proses pengambilan keputusan.
- (b) representasi tepat: informasi disajikan secara tepat atau secara apa yang seharusnya disajikan dan bebas dari kesalahan material dan bias.
- (c) keterbandingan: informasi dalam laporan keuangan entitas dapat dibandingkan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Informasi dalam laporan keuangan entitas juga dapat dibandingkan antar entitas untuk mengevaluasi posisi dan kinerja keuangan.
- (d) keterpahaman: informasi yang disajikan dapat dengan mudah dipahami oleh pengguna. Pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai serta kemauan untuk mempelajari informasi tersebut dengan ketekunan yang wajar.

KEPATUHAN TERHADAP ED SAK EMKM

3.4. Entitas yang laporan keuangannya telah patuh terhadap ED SAK EMKM membuat pernyataan secara eksplisit dan tanpa kecuali tentang kepatuhan terhadap ED SAK EMKM dalam catatan atas laporan keuangan. Entitas tidak dapat mendeskripsikan bahwa laporan keuangan telah patuh terhadap ED SAK EMKM, kecuali laporan keuangan tersebut telah patuh terhadap seluruh persyaratan dalam ED SAK EMKM.

FREKUENSI PELAPORAN

3.5. Entitas menyajikan secara lengkap laporan keuangan pada akhir setiap periode pelaporan, termasuk informasi komparatifnya.

PENYAJIAN YANG KONSISTEN

3.6. Penyajian dan klasifikasi akun-akun dalam laporan keuangan antar periode entitas disusun secara konsisten, kecuali:

- (a) telah terjadi perubahan yang signifikan atas sifat operasi entitas atau jika perubahan penyajian atau klasifikasi akun-akun dalam laporan keuangan menghasilkan penyajian yang lebih sesuai dengan mempertimbangkan kriteria pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi dalam Bab 7 *Kebijakan Akuntansi, Estimasi, dan Kesalahan*; atau
- (b) ED SAK EMKM mensyaratkan perubahan penyajian.

3.7. Jika penyajian atau klasifikasi akun-akun dalam laporan keuangan diubah karena penerapan paragraf 3.6 di atas, maka entitas mereklasifikasikan jumlah komparatif, kecuali jika reklasifikasi tidak praktis.

INFORMASI KOMPARATIF

3.8. Kecuali dinyatakan lain oleh ED SAK EMKM, entitas menyajikan informasi komparatif yaitu informasi satu periode sebelumnya untuk seluruh jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan periode berjalan.

LAPORAN KEUANGAN LENGKAP

3.9. Laporan keuangan minimum terdiri dari:

- (a) Laporan posisi keuangan pada akhir periode;
- (b) Laporan laba rugi selama periode;
- (c) Catatan atas laporan keuangan, yang berisi tambahan dan rincian akun-akun tertentu yang relevan.

3.10. Karena paragraf 3.8 mensyaratkan jumlah komparatif, maka laporan keuangan lengkap berarti bahwa entitas menyajikan minimum dua periode untuk setiap laporan keuangan yang disyaratkan dan catatan atas laporan keuangan yang terkait.

IDENTIFIKASI LAPORAN KEUANGAN

3.11. Entitas mengidentifikasi secara jelas setiap laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Selain itu, entitas menunjukkan informasi berikut dengan jelas dan diulangi bilamana perlu untuk pemahaman informasi yang disajikan:

- (a) Nama entitas yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan;
- (b) Tanggal akhir periode pelaporan dan periode laporan keuangan;
- (c) Rupiah sebagai mata uang penyajian; dan
- (d) Pembulatan angka yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan.

BAB 4 LAPORAN POSISI KEUANGAN

RUANG LINGKUP

4.1. Bab ini mengatur informasi yang disajikan di dalam laporan posisi keuangan dan bagaimana menyajikannya. Laporan posisi keuangan menyajikan informasi tentang aset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada akhir periode pelaporan.

INFORMASI YANG DISAJIKAN

4.2. Laporan posisi keuangan entitas dapat mencakup akun-akun berikut:

- (a) kas dan setara kas;
- (b) piutang;
- (c) persediaan;
- (d) aset tetap;
- (e) utang usaha;
- (f) utang bank;
- (g) ekuitas.

4.3. Entitas menyajikan akun dan bagian dari akun dalam laporan posisi keuangan jika penyajian tersebut relevan untuk memahami posisi keuangan entitas.

4.4. ED SAK EMKM tidak menentukan format atau urutan terhadap akun-akun yang disajikan. Meskipun demikian, entitas dapat menyajikan akun-akun aset berdasarkan urutan likuiditas dan akun-akun liabilitas berdasarkan urutan jatuh tempo.

KLASIFIKASI ASET DAN LIABILITAS

4.5. Entitas dapat menyajikan aset lancar dan aset tidak lancar serta liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang secara terpisah di dalam laporan posisi keuangan.

4.6. Entitas mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar jika:

- (a) diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan, dalam jangka waktu siklus operasi normal entitas;
- (b) dimiliki untuk diperdagangkan;
- (c) diharapkan akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan; atau
- (d) berupa kas atau setara kas, kecuali jika dibatasi penggunaannya dari pertukaran atau digunakan untuk menyelesaikan liabilitas setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.

4.7. Entitas mengklasifikasikan semua aset lainnya sebagai tidak lancar. Jika siklus operasi normal entitas tidak dapat diidentifikasi dengan jelas, maka siklus operasi diasumsikan 12 bulan.

4.8. Entitas mengklasifikasikan liabilitas sebagai liabilitas jangka pendek jika:

- (a) diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi entitas;
- (b) dimiliki untuk diperdagangkan;
- (c) kewajiban akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan;
atau
- (d) entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.

4.9. Entitas mengklasifikasikan semua liabilitas lainnya sebagai liabilitas jangka panjang.

KLASIFIKASI EKUITAS

4.10. Entitas menyajikan secara terpisah komponen ekuitas sesuai dengan Bab 13.

BAB 5 LAPORAN LABA RUGI

RUANG LINGKUP

5.1. Bab ini mensyaratkan entitas untuk menyajikan laporan laba rugi yang merupakan kinerja keuangan entitas untuk suatu periode. Bab ini juga mengatur informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi dan bagaimana penyajiannya.

INFORMASI YANG DISAJIKAN

5.2. Laporan laba rugi entitas dapat mencakup akun-akun sebagai berikut:

- (a) pendapatan;
- (b) beban keuangan;
- (c) beban pajak;

5.3. Entitas menyajikan akun dan bagian dari akun dalam laporan laba rugi jika penyajian tersebut relevan untuk memahami kinerja keuangan entitas.

5.4. Laporan laba rugi memasukkan semua penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode, kecuali ED SAK EMKM mensyaratkan lain. ED SAK EMKM mengatur perlakuan atas dampak koreksi atas kesalahan dan perubahan kebijakan akuntansi yang disajikan sebagai penyesuaian retrospektif terhadap periode yang lalu dan bukan sebagai bagian dari laba atau rugi dalam periode terjadinya perubahan (Lihat Bab 7 *Kebijakan Akuntansi, Estimasi, dan Kesalahan*).

BAB 6 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

RUANG LINGKUP

6.1. Bab ini mengatur prinsip yang mendasari informasi yang disajikan dalam catatan atas laporan keuangan dan bagaimana penyajiannya.

INFORMASI YANG DISAJIKAN

6.2. Catatan atas laporan keuangan memuat:

- (a) suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan ED SAK EMKM;
- (b) ikhtisar kebijakan akuntansi;
- (c) informasi tambahan dan rincian akun tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan.

6.3. Jenis informasi tambahan dan rincian yang disajikan bergantung pada jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh entitas.

6.4. Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis sepanjang hal tersebut praktis. Setiap akun dalam laporan keuangan merujuk-silang ke informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan.

BAB 7 KEBIJAKAN AKUNTANSI, ESTIMASI, DAN KESALAHAN

RUANG LINGKUP

7.1. Bab ini memberikan panduan untuk memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan. Bab ini juga mengatur perlakuan akuntansi jika terdapat perubahan estimasi akuntansi dan koreksi kesalahan periode lalu.

KEBIJAKAN AKUNTANSI

7.2. Kebijakan akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan, dan praktik tertentu yang diterapkan oleh entitas dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangannya.

7.3. Jika ED SAK EMKM secara spesifik mengatur perlakuan akuntansi atas suatu transaksi, peristiwa, atau keadaan lainnya, maka entitas menerapkan kebijakan akuntansi sesuai dengan pengaturan yang ada dalam ED SAK EMKM ini.

7.4. Jika ED SAK EMKM tidak secara spesifik mengatur perlakuan akuntansi atas suatu transaksi, peristiwa, atau keadaan lainnya, maka entitas hanya mengacu pada dan mempertimbangkan definisi, kriteria pengakuan, dan konsep pengukuran untuk aset, liabilitas, penghasilan, dan beban, serta prinsip pervasif dalam Bab 2 *Konsep dan Prinsip Pervasif* ED SAK EMKM ini. Entitas tidak mempertimbangkan pengaturan lain di luar pengaturan dalam ED SAK EMKM untuk transaksi, peristiwa, atau keadaan lain tersebut.

KONSISTENSI KEBIJAKAN AKUNTANSI

7.5. Entitas memilih dan menerapkan kebijakan akuntansinya secara konsisten untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lain yang serupa.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

7.6. Entitas mengubah kebijakan akuntansinya hanya jika perubahan tersebut:

- (a) disyaratkan berubah sesuai dengan ED SAK EMKM; atau
- (b) akan menghasilkan laporan keuangan yang menyediakan informasi yang andal dan lebih relevan mengenai pengaruh transaksi, peristiwa, dan kondisi lain terhadap posisi keuangan atau kinerja keuangan.

7.7. Hal-hal berikut ini bukan merupakan perubahan kebijakan akuntansi:

- (a) penerapan kebijakan akuntansi untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lain yang berbeda

- secara substansi dengan transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang terjadi sebelumnya; dan
- (b) penerapan kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lainnya yang belum terjadi sebelumnya atau tidak material.

Penerapan Perubahan Kebijakan Akuntansi

7.8. Entitas mencatat perubahan kebijakan akuntansi sebagai berikut:

- (a) entitas menerapkan perubahan kebijakan akuntansi sebagai akibat perubahan persyaratan dalam ED SAK EMKM sesuai dengan ketentuan transisinya, jika ada; atau
- (b) entitas menerapkan seluruh perubahan kebijakan akuntansi lainnya secara retrospektif (lihat paragraf 7.9).

Penerapan Retrospektif

7.9. Jika perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif sesuai dengan paragraf 7.8, maka entitas menerapkan kebijakan akuntansi baru untuk informasi komparatif periode lalu untuk tanggal paling awal ketika hal tersebut praktis, seolah-olah kebijakan akuntansi baru tersebut telah diterapkan sebelumnya. Jika tidak praktis untuk menentukan dampak terhadap periode individual dari perubahan kebijakan akuntansi untuk informasi komparatif satu atau lebih periode lalu yang disajikan, maka entitas harus menerapkan kebijakan akuntansi baru atas nilai tercatat aset dan liabilitas pada periode sajian paling awal di mana penerapan retrospektif adalah praktis, mungkin pada periode berjalan, dan membuat penyesuaian ke saldo awal setiap komponen ekuitas yang terpengaruh untuk periode tersebut.

7.10. Penerapan suatu pengaturan adalah tidak praktis, ketika entitas tidak dapat menerapkan pengaturan tersebut setelah seluruh upaya yang masuk akal dilakukan.

PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI

7.11. Perubahan estimasi akuntansi adalah penyesuaian jumlah tercatat aset atau liabilitas yang berasal dari informasi baru atau tambahan pengalaman dan, oleh karena itu, bukan koreksi kesalahan.

7.12. Entitas mengakui pengaruh perubahan estimasi akuntansi secara prospektif (kecuali perubahan di mana paragraf 7.13 diterapkan) dengan memasukkannya ke laporan laba rugi pada:

- (a) periode terjadinya perubahan, jika hanya berpengaruh terhadap periode tersebut; atau
- (b) periode terjadinya perubahan dan periode mendatang, jika berpengaruh terhadap keduanya.

7.13. Jika perubahan estimasi akuntansi mengubah aset dan liabilitas, atau terkait dengan suatu akun di ekuitas, maka entitas mengakuinya dengan menyesuaikan jumlah tercatat akun aset,

liabilitas, atau ekuitas yang terkait di periode perubahan tersebut.

KOREKSI KESALAHAN PERIODE LALU

7.14. Kesalahan periode lalu adalah kelalaian dan kesalahan pencatatan dalam laporan keuangan entitas untuk satu atau lebih periode lalu yang muncul dari kegagalan untuk menggunakan atau kesalahan penggunaan informasi yang andal:

- (a) yang tersedia ketika laporan keuangan diterbitkan; dan
- (b) yang selayaknya telah diperoleh dan dipertimbangkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut.

7.15. Kesalahan tersebut termasuk dampak kesalahan matematis, kesalahan penerapan kebijakan akuntansi, kekeliruan atau kesalahan interpretasi fakta, dan kecurangan.

7.16. Jika praktis, entitas mengoreksi kesalahan periode lalu secara retrospektif pada laporan keuangan yang diterbitkan pertama kali setelah penemuan, dengan cara:

- (a) menyajikan kembali jumlah komparatif untuk periode penyajian sebelumnya di mana kesalahan terjadi; atau
- (b) jika kesalahan terjadi sebelum periode penyajian paling awal, maka saldo awal aset, liabilitas, dan ekuitas periode penyajian paling awal disajikan kembali.

7.17. Jika tidak praktis untuk menentukan periode spesifik pengaruh kesalahan atas informasi komparatif untuk satu atau lebih periode sebelumnya yang disajikan, maka entitas menyajikan kembali saldo awal aset, liabilitas, dan ekuitas untuk periode paling awal di mana penyajian kembali secara restropektif praktis dilakukan (kemungkinan dapat dilakukan pada periode berjalan).

7.18. Tidak praktis adalah kondisi di mana entitas tidak dapat menerapkan suatu pengaturan setelah seluruh upaya yang masuk akal telah dilakukan.

BAB 8 ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

RUANG LINGKUP

8.1. Bab ini mengatur prinsip-prinsip pengakuan, pengukuran, penghentian pengakuan, dan penyajian aset dan liabilitas keuangan.

8.2. Aset keuangan adalah setiap aset yang berupa:

- (a) Kas;
- (b) Instrumen ekuitas entitas lain; dan
- (c) Hak kontraktual untuk menerima kas atau aset keuangan lain dari entitas lain.

8.3. Liabilitas keuangan adalah setiap liabilitas yang berupa kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain.

8.4. Contoh aset dan liabilitas keuangan yang dicakup dalam ruang lingkup Bab ini termasuk:

- (a) Piutang dan utang;
- (b) Pinjaman yang diberikan atau yang diterima;
- (c) Investasi pada instrumen utang (contoh: obligasi yang diperdagangkan); dan
- (d) Investasi pada instrumen ekuitas (contoh: saham perusahaan yang diperdagangkan di bursa efek).

8.5. Bab ini tidak berlaku untuk:

- (a) Aset dan liabilitas terkait imbalan kerja yang diatur dalam Bab 14;
- (b) Aset dan liabilitas pajak penghasilan yang diatur dalam Bab 15.

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

8.6. Entitas mengakui aset dan liabilitas keuangan hanya ketika entitas menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontraktual aset dan liabilitas keuangan tersebut. Aset keuangan dan liabilitas keuangan diukur sebesar biaya perolehannya.

8.7. Biaya perolehan aset dan liabilitas keuangan diukur pada harga transaksi (*transaction price*). Contoh harga transaksi aset dan liabilitas keuangan adalah sebagai berikut:

- (a) Untuk pinjaman, harga transaksinya adalah sebesar jumlah pinjaman.
- (b) Untuk piutang atau utang, harga transaksinya adalah sebesar jumlah tagihan.
- (c) Untuk investasi pada instrumen ekuitas dan instrumen utang, harga transaksinya adalah sebesar imbalan yang diberikan (contoh: kas yang dibayarkan untuk memperoleh investasi dalam bentuk saham perusahaan publik).

8.8. Biaya transaksi (*transaction cost*) adalah biaya yang terkait langsung dengan perolehan aset dan liabilitas keuangan. Biaya transaksi diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi. Misalnya, entitas menerima pinjaman dari bank dan sebagai syarat untuk memperoleh pinjaman tersebut, bank membebankan biaya tertentu. Entitas mencatat biaya transaksi atas pinjaman tersebut sebagai beban dalam laporan laba rugi.

8.9. Pada akhir periode pelaporan, entitas mengukur aset dan liabilitas keuangannya pada:

- (a) harga transaksi (lihat Paragraf 8.7 di atas); dan
- (b) dikurangkan dengan seluruh pembayaran pokok dan seluruh pembayaran atau penerimaan bunga sampai dengan tanggal tersebut.

8.10. Pada akhir periode pelaporan, entitas tidak mengakui penurunan nilai pada aset keuangan. Namun, entitas yang berada dalam pengawasan otoritas di bidang jasa keuangan dapat mengakui penyisihan atas pinjaman yang diberikan sesuai dengan ketentuan dari otoritas tersebut.

PENGHENTIAN PENGAKUAN

8.11. Entitas menghentikan pengakuan aset keuangannya hanya ketika:

- (a) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir; atau
- (b) ketika tidak ada manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan akan diperoleh dari kepemilikan atau pelepasan aset keuangan tersebut.

8.12. Entitas menghentikan pengakuan liabilitas keuangannya (atau bagian dari liabilitas keuangannya) hanya ketika liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan, dibatalkan, atau jatuh tempo.

8.13. Entitas mengakui keuntungan atau kerugian atas penghentian pengakuan aset dan liabilitas keuangan dalam laporan laba rugi ketika akun tersebut dihentikan pengakuannya.

PENYAJIAN

8.14. Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan jumlah neto disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, entitas:

- (a) memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui; dan
- (b) memiliki intensi untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset tersebut dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

8.15. Entitas menyajikan aset keuangan dalam kelompok aset pada laporan posisi keuangan dan liabilitas keuangan dalam kelompok liabilitas pada laporan posisi keuangan.

BAB 9 PERSEDIAAN

RUANG LINGKUP

9.1. Bab ini mengatur prinsip-prinsip pengakuan, pengukuran, dan penyajian persediaan. Persediaan adalah aset:

- (a) untuk dijual dalam kegiatan normal;
- (b) dalam proses produksi untuk kemudian dijual; atau
- (c) dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa.

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

9.2. Entitas mengakui persediaan ketika diperoleh, sebesar biaya perolehannya.

9.3. Biaya perolehan persediaan mencakup seluruh biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lainnya yang terjadi untuk membawa persediaan ke kondisi dan lokasi siap digunakan.

9.4. Teknik pengukuran biaya persediaan, seperti metode biaya standar atau metode eceran, demi kemudahan, dapat digunakan jika hasilnya mendekati biaya perolehan.

9.5. Entitas dapat memilih menggunakan rumus biaya masuk-pertama keluar-pertama (MPKP) atau rata-rata tertimbang dalam menentukan biaya perolehan persediaan.

PENYAJIAN

9.6. Persediaan disajikan dalam kelompok aset dalam laporan posisi keuangan.

9.7. Jika persediaan dijual, maka jumlah tercatatnya diakui sebagai beban periode di mana pendapatan yang terkait diakui.

BAB 10 INVESTASI PADA VENTURA BERSAMA

RUANG LINGKUP

10.1. Bab ini mengatur akuntansi untuk investasi pada ventura bersama.

DEFINISI VENTURA BERSAMA

10.2. Ventura bersama adalah pengaturan bersama bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama memiliki hak atas aset neto pengaturan tersebut. Para pihak tersebut disebut ventura bersama.

10.3. Pengendalian bersama adalah persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian atas suatu pengaturan, yang hanya ada ketika keputusan mengenai aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian.

PENGUKURAN

10.4. Entitas mengukur investasi pada ventura bersama pada biaya perolehannya.

10.5. Entitas tidak mengakui penurunan nilai atas investasi pada ventura bersama.

PENYAJIAN

10.6. Entitas menyajikan investasi pada ventura bersama dalam kelompok aset pada laporan posisi keuangan.

BAB 11 ASET TETAP

RUANG LINGKUP

11.1. Bab ini mengatur prinsip-prinsip pengakuan dan pengukuran aset tetap, termasuk tanah dan bangunan yang dimiliki untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau keduanya.

11.2. Aset takberwujud yang perolehannya tidak dapat dipisahkan dengan perolehan aset tetap mengikuti pengaturan dalam Bab ini.

11.3. Aset tetap adalah aset yang:

- (a) dimiliki oleh entitas untuk digunakan dalam kegiatan normal usahanya; dan
- (b) diharapkan akan digunakan entitas untuk lebih dari satu periode.

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

11.4. Entitas menerapkan kriteria pengakuan dalam paragraf 2.22 dalam menentukan pengakuan aset tetap. Oleh karena itu, entitas mengakui suatu pengeluaran sebagai biaya perolehan aset tetap, jika:

- (a) manfaat ekonomi dapat dipastikan mengalir ke dalam atau dari entitas; dan
- (b) biaya dapat diukur dengan andal.

11.5. Tanah dan bangunan adalah aset yang dapat dipisahkan dan dicatat secara terpisah, meskipun tanah dan bangunan tersebut diperoleh secara bersamaan.

11.6. Aset tetap dicatat jika aset tetap tersebut dimiliki secara hukum oleh entitas sebesar biaya perolehannya.

11.7. Biaya perolehan aset tetap meliputi harga beli dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan intensinya.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

11.8. Entitas mengukur seluruh aset tetap, kecuali tanah, setelah pengakuan awal pada biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan.

11.9. Biaya perbaikan dan renovasi aset tetap dicatat sebagai beban dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya.

11.10. Entitas tidak mengakui penurunan nilai atas aset tetap maupun atas tanah dan bangunan yang dimiliki untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau untuk keduanya.

PENYUSUTAN

11.11. Beban penyusutan diakui dalam laporan laba rugi.

11.12. Penyusutan aset tetap dapat dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus atau metode saldo menurun dan tanpa memperhitungkan nilai residu (nilai sisa).

11.13. Penyusutan aset tetap dimulai ketika suatu aset tersedia untuk digunakan, misalnya aset berada di lokasi dan kondisi yang diperlukan sehingga mampu beroperasi sebagaimana yang diharapkan oleh manajemen. Penyusutan dihentikan ketika aset dihentikan pengakuannya. Penyusutan tidak dihentikan ketika aset tidak digunakan atau ketika aset dihentikan penggunaan aktifnya, kecuali aset tersebut telah disusutkan secara penuh.

11.14. Umur manfaat aset ditentukan berdasarkan periode kegunaan yang diperkirakan oleh entitas.

PENGHENTIAN PENGAKUAN

11.15. Entitas menghentikan pengakuan aset tetap pada saat:

- (a) aset tetap dilepaskan; atau
- (b) ketika tidak ada manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasan aset tetap tersebut.

11.16. Entitas mengakui keuntungan atau kerugian atas penghentian pengakuan aset tetap dalam laporan laba rugi ketika aset tetap tersebut:

- (a) dijual; sehingga selisih antara jumlah rupiah yang diterima dan nilai buku aset tetap dicatat sebagai pendapatan lain-lain (jika untung) atau beban lain-lain (jika rugi);
- (b) diserahkan kepada pihak lain; sehingga dicatat sebagai beban lain-lain sebesar nilai buku aset tetap tersebut; atau
- (c) dimusnahkan; sehingga dicatat sebagai beban lain-lain sebesar nilai buku aset tetap tersebut.

PENYAJIAN

11.17. Aset tetap disajikan dalam kelompok aset dalam laporan posisi keuangan.

BAB 12 ASET TAKBERWUJUD

RUANG LINGKUP

12.1. Bab ini mengatur perlakuan akuntansi aset takberwujud yang diperoleh secara terpisah, kecuali aset takberwujud yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha normal entitas (lihat Bab 14 Pendapatan dan Beban).

12.2. Aset takberwujud adalah aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud. Suatu aset dapat diidentifikasi, jika:

- (a) dapat dipisahkan dari entitas, misalnya: dapat dijual, dialihkan, dilisensikan, disewakan, atau ditukarkan; dan
- (b) timbul dari hak kontraktual atau hak hukum lainnya, terlepas apakah hak tersebut dapat dialihkan atau dipisahkan dari entitas.

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

12.3. Entitas mengakui aset takberwujud yang diperoleh secara terpisah, jika:

- (a) dapat dipastikan entitas akan memperoleh manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut; dan
- (b) biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal.

12.4. Entitas mengukur aset takberwujud yang diperoleh secara terpisah sebagai beban dibayar di muka sebesar biaya perolehannya.

12.5. Biaya perolehan aset takberwujud meliputi harga beli dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung dalam mempersiapkan aset untuk digunakan sesuai dengan intensinya.

12.6. Aset takberwujud yang dihasilkan secara internal diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Contoh pengeluaran yang diakui sebagai beban dan bukan sebagai aset takberwujud adalah:

- (a) pengeluaran untuk aktivitas riset dan pengembangan;
- (b) pengeluaran untuk merek, logo, judul publikasi, daftar konsumen yang dihasilkan secara internal, dan hak lain yang serupa;
- (c) aktivitas perintisan (biaya perintisan), termasuk biaya legal dan kesekretariatan dalam rangka mendirikan entitas hukum, pengeluaran dalam rangka membuka usaha atau fasilitas baru atau pengeluaran untuk memulai operasi baru atau untuk meluncurkan produk atau proses baru;
- (d) aktivitas pelatihan;

(e) aktivitas periklanan dan promosi;

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

12.7. Entitas mengukur aset takberwujud pada biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi amortisasi.

12.8. Entitas tidak mengakui penurunan nilai atas aset takberwujud.

Umur Manfaat

12.9. Aset takberwujud dianggap mempunyai umur manfaat yang terbatas. Umur manfaat aset takberwujud yang timbul dari hak kontraktual atau hak hukum lainnya tidak melebihi periode hak kontraktual atau hak hukum tersebut, tetapi mungkin lebih pendek, bergantung pada lamanya periode yang diharapkan entitas untuk menggunakan aset tersebut. Jika hak kontraktual atau hak lainnya untuk masa yang terbatas dapat diperbarui, maka umur manfaat aset takberwujud harus termasuk periode pembaruan hanya jika terdapat bukti yang mendukung pembaruan oleh entitas tanpa biaya yang signifikan.

Periode dan Metode Amortisasi

12.10. Entitas mengalokasikan jumlah yang dapat disusutkan dari aset takberwujud secara sistematis selama umur manfaatnya. Beban amortisasi untuk setiap periode diakui dalam laporan laba rugi.

12.11. Amortisasi dimulai ketika aset siap digunakan, yaitu ketika aset tersebut berada di lokasi dan kondisi yang diperlukan sehingga mampu beroperasi sesuai dengan keinginan manajemen. Amortisasi dihentikan ketika aset dihentikan pengakuannya.

12.12. Amortisasi aset takberwujud dapat dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus atau metode saldo menurun, dan tanpa memperhitungkan nilai residu (nilai sisa).

PENGHENTIAN PENGAKUAN

12.13. Entitas menghentikan pengakuan aset takberwujud pada saat:

- (a) aset takberwujud dilepaskan; atau
- (b) ketika tidak ada manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasan aset tetap tersebut.

PENYAJIAN

12.14. Aset takberwujud disajikan dalam kelompok aset dalam laporan posisi keuangan.

BAB 13 LIABILITAS DAN EKUITAS

RUANG LINGKUP

13.1. Bab ini mengatur tentang prinsip-prinsip pengakuan, pengukuran, dan penyajian liabilitas, namun tidak termasuk imbalan pascakerja yang akan dibayarkan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.

13.2. Bab ini juga mengatur tentang prinsip pengakuan, pengukuran, dan penyajian ekuitas.

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

13.3. Entitas menerapkan kriteria pengakuan dalam paragraf 2.23 dalam menentukan pengakuan liabilitas.

13.4. Liabilitas dicatat sebesar jumlah yang harus dibayarkan.

13.5. Entitas tidak mengakui provisi dan liabilitas kontinjensi, namun entitas dapat mengungkapkan adanya provisi dan liabilitas kontinjensi jika material. Entitas juga tidak diperkenankan untuk mengakui aset kontinjensi sebagai aset.

13.6. Liabilitas dikeluarkan atau dihentikan pengakuannya ketika liabilitas tersebut telah dilunasi dengan kas atau setara kas dan/atau aset nonkas telah dibayarkan kepada pihak lain sebesar jumlah yang harus dibayarkan.

13.7. Modal yang disetor oleh pemilik dana dapat berupa kas atau setara kas atau aset nonkas yang dicatat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

13.8. Untuk entitas yang berbentuk Perseroan Terbatas, akun tambahan modal disetor disajikan untuk setiap kelebihan setoran modal atas nilai nominal saham.

13.9. Untuk badan usaha yang tidak berbentuk Perseroan Terbatas, ekuitas diakui dan diukur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku untuk badan usaha tersebut.

PENYAJIAN

13.10. Liabilitas disajikan dalam kelompok liabilitas dalam laporan posisi keuangan.

13.11. Modal saham, tambahan modal disetor, dan saldo laba rugi disajikan dalam kelompok

ekuitas dalam laporan posisi keuangan.

13.12. Saldo laba merupakan akumulasi selisih penghasilan dan beban, setelah dikurangkan dengan distribusi kepada pemilik (misalnya, dividen yang dibagikan), jika ada. Saldo laba timbul ketika akumulasi penghasilan melebihi beban dan distribusi kepada pemilik pada suatu periode. Ketika akumulasi penghasilan kurang dari beban dan distribusi kepada pemilik pada suatu periode, maka entitas menyajikan saldo laba negatif.

BAB 14 PENDAPATAN DAN BEBAN

RUANG LINGKUP

14.1 Bab ini mengatur tentang akuntansi untuk pengakuan, pengukuran, serta penyajian pendapatan dan beban.

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN PENDAPATAN

14.2. Pendapatan diakui ketika terdapat hak atas pembayaran yang diterima atau yang masih harus diterima baik pada masa sekarang atau masa depan.

14.3. Entitas mencatat pendapatan untuk manfaat ekonomi yang diterima atau yang masih harus diterima secara bruto. Entitas mengeluarkan dari pendapatan sejumlah nilai yang menjadi bagian pihak ketiga seperti pajak penjualan, pajak atas barang dan jasa, dan pajak pertambahan nilai. Dalam hubungan keagenan, entitas mencatat pendapatan hanya sebesar jumlah komisi. Jumlah yang diperoleh atas nama pihak prinsipal bukan merupakan pendapatan entitas.

14.4. Entitas dapat mengakui pendapatan dari suatu penjualan barang atau penyediaan jasa ketika barang atau jasa tersebut telah dijual atau diberikan kepada pelanggan.

- (a) Jika pembeli membayar sebelum barang atau jasa tersebut diberikan, maka entitas mengakui penerimaan tersebut sebagai liabilitas, yaitu pendapatan diterima dimuka.
- (b) Jika pembeli belum membayar ketika barang atau jasa tersebut telah diberikan, maka entitas mengakui adanya aset, yaitu piutang usaha.

14.5. Entitas mengakui pendapatan kontrak dan biaya kontrak yang berhubungan dengan kontrak konstruksi masing-masing sebagai pendapatan dan beban sebesar jumlah tagihan. Dalam hal entitas telah menerima uang muka sebelum aktivitas kontrak dimulai, maka entitas menerapkan ketentuan dalam Paragraf 14.4(a).

14.6. Entitas dapat mengakui pendapatan bunga dan dividen ketika pendapatan tersebut diterima selama periode.

14.7. Entitas dapat mengakui pendapatan lain seperti pendapatan sewa dan royalti dengan menggunakan metode garis lurus selama jangka waktu kontrak.

14.8. Entitas dapat mengakui pendapatan lain seperti keuntungan dari penjualan aset ketika kepemilikan atas aset tersebut telah beralih kepada pemilik baru. Keuntungan tersebut merupakan hasil penjualan dikurangi jumlah tercatat aset sebelum aset tersebut dijual.

Pendapatan Hibah

14.9. Hibah adalah bantuan yang diterima oleh entitas dalam bentuk pengalihan sumber daya. Hibah termasuk hibah atau bantuan dari Pemerintah maupun pihak lain yang diberikan kepada entitas bukan dalam kapasitasnya sebagai pemilik.

14.10. Entitas mengakui penerimaan hibah dalam laba rugi pada saat hibah tersebut diterima sebesar jumlah nominalnya.

14.11. Hibah, termasuk hibah aset nonmoneter seperti tanah atau sumber daya lain, tidak diakui hingga terdapat keyakinan yang memadai bahwa:

- (a) entitas akan mematuhi kondisi yang melekat pada hibah tersebut; dan
- (b) hibah akan diterima.

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN BEBAN

14.12. Jika pekerja memberikan jasa kepada entitas selama periode pelaporan, maka entitas mengakui beban imbalan kerja sebesar nilai tidak terdiskonto yang diperkirakan akan dibayar sebagai imbalan atas jasa tersebut. Paragraf ini diterapkan untuk jenis-jenis imbalan kerja berikut ini:

- (a) Imbalan kerja jangka pendek, yaitu imbalan kerja yang jatuh tempo seluruhnya dalam waktu 12 bulan setelah akhir periode pekerja memberikan jasanya;
- (b) Pesangon pemutusan kerja adalah imbalan kerja yang terutang akibat:
 - i. Keputusan entitas untuk memberhentikan pekerja sebelum usia pensiun normal; atau
 - ii. Keputusan pekerja menerima tawaran untuk mengundurkan diri secara sukarela dengan imbalan tertentu; dan
- (c) Imbalan kerja lainnya, yaitu imbalan kerja yang tidak seluruhnya jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah pekerja memberikan jasanya.

14.13. Pembayaran sewa diakui sebagai beban sewa berdasarkan metode garis lurus selama masa sewa.

14.14. Seluruh biaya pinjaman diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya.

PENGUKURAN ANDAL

14.15. Dalam hal pendapatan dan beban tidak dapat diukur secara andal, maka pendapatan diakui pada saat kas diterima, dengan memperhatikan ketentuan dalam paragraf 14.4(a), dan beban

diakui pada saat kas dibayar.

PENYAJIAN

14.16. Pendapatan disajikan dalam kelompok pendapatan dalam laporan laba rugi.

14.17. Entitas menyajikan pendapatan hibah sebagai bagian dari laba rugi, baik secara terpisah atau dalam akun umum seperti “pendapatan lain-lain”; atau alternatif lain, sebagai pengurang beban terkait.

14.18. Beban disajikan dalam kelompok beban dalam laporan laba rugi.



BAB 15 PAJAK PENGHASILAN

RUANG LINGKUP

15.1. Bab ini mengatur akuntansi untuk pajak penghasilan entitas.

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

15.2. Entitas mengakui aset dan liabilitas pajak penghasilan dengan mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku.

15.3. Entitas tidak mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan.

BAB 16 TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING

RUANG LINGKUP

16.1. Bab ini mengatur perlakuan akuntansi translasi untuk transaksi yang dilakukan dalam mata uang asing.

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

16.2. Transaksi mata uang asing adalah transaksi yang didenominasi atau diselesaikan dalam mata uang asing yang meliputi transaksi yang timbul ketika entitas:

- (a) membeli atau menjual barang atau jasa yang harganya didenominasi dalam mata uang asing;
- (b) meminjam atau meminjamkan dana atas sejumlah utang atau piutang yang didenominasi dalam mata uang asing;
- (c) memperoleh atau melepas aset, atau menyelesaikan liabilitas yang didenominasi dalam mata uang asing.

16.3. Entitas mencatat transaksi yang terjadi dalam mata uang asing dengan menggunakan mata uang Rupiah berdasarkan kurs tunai pada tanggal transaksi.

16.4. Tanggal transaksi adalah tanggal di mana transaksi pertama kali memenuhi syarat pengakuan sesuai dengan ED SAK EMKM.

BAB 17 KETENTUAN TRANSISI

17.1. Entitas yang menerapkan ED SAK EMKM untuk pertama kalinya, menyusun laporan keuangannya sesuai dengan ED SAK EMKM dengan mengikuti ketentuan dalam Bab ini.

17.2. Laporan keuangan pertama yang sesuai dengan ED SAK EMKM adalah laporan keuangan pertama di mana entitas membuat pernyataan secara eksplisit dan tanpa terkecuali tentang kepatuhan terhadap ED SAK EMKM dalam catatan atas laporan keuangannya. Laporan keuangan pertama disusun sesuai dengan ED SAK EMKM, sebagai contoh, jika entitas:

- (a) belum atau tidak menyusun laporan keuangan pada periode sebelumnya; atau
- (b) menyajikan laporan keuangan periode sebelumnya dengan menggunakan SAK lain sehingga tidak konsisten dengan ED SAK EMKM.

17.3. Paragraf 3.9 mendefinisikan laporan keuangan entitas.

17.4. Paragraf 3.10 mensyaratkan agar entitas menyajikan, dalam laporan keuangan lengkap, informasi komparatif periode sebelumnya untuk seluruh jumlah yang disajikan dalam laporan keuangannya. Tanggal transisi entitas ke ED SAK EMKM adalah awal periode paling awal di mana entitas menyajikan informasi komparatif secara penuh sesuai dengan ED SAK EMKM dalam laporan keuangannya, kecuali untuk entitas yang belum atau tidak menyusun laporan keuangan pada periode sebelumnya.

17.5. Entitas menerapkan ED SAK EMKM secara retrospektif, namun jika tidak praktis, maka entitas diperkenankan untuk menerapkan ED SAK EMKM secara prospektif.

17.6. Jika entitas menerapkan secara prospektif dan sebelumnya telah menyusun laporan keuangan, maka entitas:

- (a) mengakui seluruh aset dan liabilitas yang pengakuannya disyaratkan oleh ED SAK EMKM;
- (b) tidak mengakui akun-akun sebagai aset atau liabilitas jika ED SAK EMKM tidak mengizinkan pengakuan tersebut;
- (c) mereklasifikasikan akun-akun dalam kelompok aset, liabilitas, atau komponen ekuitas berdasarkan rerangka pelaporan sebelumnya agar sesuai dengan aset, liabilitas, atau komponen ekuitas berdasarkan ED SAK EMKM;
- (d) menerapkan ED SAK EMKM dalam pengukuran seluruh aset dan liabilitas yang diakui.

17.7. Kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pada saldo awal laporan posisi keuangannya berdasarkan ED SAK EMKM mungkin berbeda dari yang digunakan pada tanggal yang sama dengan berdasarkan rerangka pelaporan keuangan sebelumnya. Hasil penyesuaian yang muncul dari transaksi, kejadian, atau kondisi lainnya sebelum tanggal efektif ED SAK

EMKM diakui secara langsung pada saldo laba pada tanggal penerapan ED SAK EMKM.

17.8. Entitas dapat menggunakan satu atau lebih pengecualian di bawah ini dalam menyusun laporan keuangan pertama kalinya yang sesuai dengan ED SAK EMKM.

- (a) nilai revaluasian dianggap sebagai biaya perolehan. Jika suatu aset tetap atau aset takberwujud sebelumnya diukur dengan metode revaluasian, maka pada tanggal penerapan pertama kali ED SAK EMKM, nilai revaluasian tersebut dianggap sebagai biaya perolehan.
- (b) nilai tercatat sesuai metode ekuitas dianggap sebagai biaya perolehan. Jika suatu investasi pada ventura bersama sebelumnya diukur dengan menggunakan metode ekuitas, maka pada tanggal penerapan pertama kali ED SAK EMKM, nilai tercatat sesuai metode ekuitas tersebut dianggap sebagai biaya perolehan.

17.9. Pada tahun awal penerapan ED SAK EMKM, entitas yang memenuhi persyaratan untuk menerapkan ED SAK EMKM dapat menyusun laporan keuangan tidak berdasarkan ED SAK EMKM, tetapi berdasarkan SAK lain sepanjang diterapkan secara konsisten. Entitas tidak diperkenankan untuk kemudian menerapkan ED SAK EMKM untuk penyusunan laporan keuangan berikutnya.

17.10. Entitas yang menyusun laporan keuangan berdasarkan ED SAK EMKM kemudian tidak memenuhi persyaratan entitas yang boleh menggunakan ED SAK EMKM, maka entitas tersebut tidak diperkenankan untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan ED SAK EMKM. Entitas tersebut wajib menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK lain dan tidak diperkenankan untuk menerapkan ED SAK EMKM kembali sesuai dengan paragraf 17.9 di atas.

17.11. Entitas yang sebelumnya menggunakan SAK lain dalam menyusun laporan keuangannya dan kemudian memenuhi persyaratan entitas yang dapat menggunakan ED SAK EMKM, maka entitas tersebut dapat menggunakan ED SAK EMKM dalam menyusun laporan keuangannya. Entitas tersebut menerapkan persyaratan dalam paragraf 17.1 – 17.8.

BAB 18 TANGGAL EFEKTIF

18.1. Entitas menerapkan ED SAK EMKM untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018. Penerapan ini dianjurkan.

CONTOH ILUSTRATIF LAPORAN KEUANGAN ENTITAS

Contoh ilustratif laporan keuangan ini melengkapi, namun bukan merupakan bagian dari, ED SAK EMKM.

LATAR BELAKANG

01. *Exposure Draft* Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (ED SAK EMKM) disusun untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. Undang-Undang yang relevan sebagai acuan pengaturan tentang definisi, kriteria, dan rentang kuantitatif usaha mikro, kecil, dan menengah diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 (UU 20/2008).

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

02. Entitas dapat menggunakan contoh ilustratif ini sebagai panduan untuk mempermudah dan mendapatkan pemahaman dalam penyusunan laporan keuangannya agar sesuai dengan ED SAK EMKM.
03. Entitas mikro adalah usaha ekonomi produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
04. Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, entitas kecil dan menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil atau usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
05. Bentuk hukum entitas mikro, kecil, dan menengah di Indonesia bervariasi seperti perusahaan perseorangan, persekutuan (CV, Firma), koperasi, dan perseroan terbatas. Namun contoh ilustratif ini menekankan pada konsep entitas bisnis, sebagaimana diatur dalam ED SAK EMKM dan bukan pada bentuk hukum entitas.

ASUMSI DASAR

06. Asumsi dasar akrual dan kelangsungan usaha digunakan dalam penyusunan laporan keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah.
07. Entitas yang telah melakukan pencatatan akuntansi berdasar kas melakukan penyesuaian menjadi dasar akrual atas akun-akun yang material pada akhir periode pelaporan.

LAPORAN KEUANGAN LENGKAP

08. Laporan keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah terdiri dari:
 - (a) Laporan posisi keuangan;
 - (b) Laporan laba rugi;
 - (c) Catatan atas laporan keuangan.
09. Sumber dan penggunaan dana berdasar kas yang telah disiapkan entitas mikro, kecil, atau menengah dapat dilampirkan pada catatan atas laporan keuangan.

PENYESUAIAN DASAR KAS MENJADI AKRUAL

10. Asumsi dasar kas mencatat transaksi pendapatan dan beban ketika penerimaan atau pembayaran kas telah dilakukan, sedangkan asumsi dasar akrual mencatat transaksi pada saat terjadinya. Dasar akrual menghasilkan laporan keuangan yang mengaitkan pendapatan dengan biaya yang terjadi dalam periode yang sama.
11. Entitas yang menyusun laporan keuangan dengan menggunakan asumsi dasar kas mengubah laporan keuangan tersebut menjadi akrual dengan melakukan penyesuaian pada akhir periode pelaporan. Penyesuaian pada prinsipnya merupakan jurnal transaksi yang bersifat khusus terhadap akun-akun yang memerlukan dan hanya dilakukan pada akhir periode pelaporan keuangan.
12. Contoh akun-akun yang perlu dilakukan penyesuaian diantaranya:
 - a) Biaya yang masih harus dibayar;
 - b) Pendapatan masih harus diterima;
 - c) Beban dibayar di muka;
 - d) Pendapatan diterima di muka;
 - e) Pemakaian/biaya persediaan;
 - f) Penyusutan aset tetap.
13. Penyesuaian dilakukan entitas secara konsisten sepanjang tidak terjadi perubahan asumsi dasar yang menyebabkan penyesuaian tidak diperlukan.



LAPORAN KEUANGAN ENTITAS

**ENTITAS
LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 20x8 DAN 20x7**

DAFTAR ISI

LAPORAN POSISI KEUANGAN.....	1
LAPORAN LABA RUGI.....	2
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	3

LAPORAN KEUANGAN ENTITAS (lanjutan)

ENTITAS			
LAPORAN POSISI KEUANGAN			
31 DESEMBER 20x8 DAN 20x7			
ASET	Catatan	20x8	20x7
Kas dan setara kas			
Kas	3	xxx	xxx
Giro	4	xxx	xxx
Deposito	5	xxx	xxx
<i>Jumlah kas dan setara kas</i>		xxx	xxx
Piutang usaha	6	xxx	xxx
Persediaan		xxx	xxx
Beban dibayar di muka	7	xxx	xxx
Aset tetap		xxx	xxx
Akumulasi Penyusutan		(xx)	(xx)
<i>JUMLAH ASET</i>		xxx	xxx
LIABILITAS			
Utang usaha		xxx	xxx
Utang bank	8	xxx	xxx
<i>JUMLAH LIABILITAS</i>		xxx	xxx
EKUITAS			
Modal		xxx	xxx
Saldo laba (defisit)	9	xxx	xxx
<i>JUMLAH EKUITAS</i>		xxx	xxx
<i>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</i>		xxx	xxx

LAPORAN KEUANGAN ENTITAS (lanjutan)

ENTITAS			
LAPORAN LABA RUGI			
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20x8 DAN 20x7			
PENDAPATAN	<u>Catatan</u>	<u>20x8</u>	<u>20x7</u>
Pendapatan usaha	10	xxx	xxx
Pendapatan lain-lain		xxx	xxx
<i>JUMLAH PENDAPATAN</i>		<i>xxx</i>	<i>xxx</i>
BEBAN			
Beban usaha		xxx	xxx
Beban lain-lain	11	xxx	xxx
<i>JUMLAH BEBAN</i>		<i>xxx</i>	<i>xxx</i>
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		xxx	xxx
Beban pajak penghasilan	12	xxx	xxx
LABA (RUGI) SETELAH PAJAK PENGHASILAN		xxx	xxx

LAPORAN KEUANGAN ENTITAS (lanjutan)

ENTITAS**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN****31 DESEMBER 20x8 DAN 20x7****1. UMUM**

Entitas didirikan di Jakarta berdasarkan akta Nomor xx tanggal 1 Januari 20x7 yang dibuat dihadapan Notaris, S.H., notaris di Jakarta dan mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.xx 2016 tanggal 31 Januari 2016. Entitas bergerak dalam bidang usaha manufaktur. Entitas memenuhi kriteria sebagai entitas mikro, kecil, dan menengah sesuai UU Nomor 20 Tahun 2008. Entitas berdomisili di Jalan xxx, Jakarta Utara.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING**a. Pernyataan Kepatuhan**

Laporan keuangan disusun menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah.

b. Dasar Penyusunan

Dasar penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis dan menggunakan asumsi dasar akrual. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah.

c. Piutang usaha

Piutang usaha disajikan sebesar jumlah tagihan.

d. Persediaan

Biaya persediaan bahan baku meliputi biaya pembelian dan biaya angkut pembelian. Biaya konversi meliputi biaya tenaga kerja langsung dan *overhead*. *Overhead* tetap dialokasikan ke biaya konversi berdasarkan kapasitas produksi normal. *Overhead* variabel dialokasikan pada unit produksi berdasarkan penggunaan aktual fasilitas produksi. Entitas menggunakan rumus biaya persediaan rata-rata.

e. Aset Tetap

Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehannya jika aset tersebut dimiliki secara hukum oleh entitas. Aset tetap disusutkan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai residu.

ENTITAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 20x8 DAN 20x7

f. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan penjualan diakui ketika tagihan diterbitkan atau pengiriman dilakukan kepada pelanggan. Beban diakui saat terjadi.

g. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

3. KAS

	<u>20x8</u>	<u>20x7</u>
Kas kecil Jakarta – Rupiah	xxx	xxx

4. GIRO

	<u>20x8</u>	<u>20x7</u>
PT Bank xxx – Rupiah	xxx	xxx

5. DEPOSITO

	<u>20x8</u>	<u>20x7</u>
PT Bank xxx – Rupiah	xxx	xxx
Suku Bunga Deposito:		
Rupiah	<u>20x8</u> 4,50%	<u>20x7</u> 5,00%

6. PIUTANG USAHA

	<u>20x8</u>	<u>20x7</u>
Toko A	xxx	xxx
Toko B	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
Jumlah	xxx	xxx

ENTITAS		
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN		
31 DESEMBER 20x8 DAN 20x7		
7.	BEBAN DIBAYAR DI MUKA	
		<u>20x8</u> <u>20x7</u>
	Sewa	xxx xxx
	Asuransi	xxx xxx
	Lisensi dan perizinan	<u>xxx</u> <u>xxx</u>
	Jumlah	xxx xxx
8.	UTANG BANK	
	Pada tanggal 4 Maret 20x8, Entitas memperoleh pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) dari PT Bank ABC dengan maksimum kredit Rpxxx, suku bunga efektif 11% per tahun dengan jatuh tempo berakhir tanggal 19 April 20X8. Pinjaman dijamin dengan persediaan dan sebidang tanah milik entitas.	
9.	SALDO LABA	
	Saldo laba merupakan akumulasi selisih penghasilan dan beban, setelah dikurangkan dengan distribusi kepada pemilik.	
10.	PENDAPATAN PENJUALAN	
		<u>20x8</u> <u>20x7</u>
	Penjualan	xxx xxx
	Retur penjualan	<u>xxx</u> <u>xxx</u>
	Jumlah	xxx xxx
11.	BEBAN LAIN-LAIN	
		<u>20x8</u> <u>20x7</u>
	Bunga pinjaman	xxx xxx
	Lain-lain	<u>xxx</u> <u>xxx</u>
	Jumlah	xxx xxx
12.	BEBAN PAJAK PENGHASILAN	
		<u>20x8</u> <u>20x7</u>
	Pajak penghasilan	xxx xxx

CONTOH PENYESUAIAN DASAR KAS MENJADI AKRUAL

- A. Biaya yang masih harus dibayar adalah biaya yang sudah terjadi dalam periode laporan keuangan namun belum dicatat atau belum dilunasi.

Contoh:

Pada tanggal 1 Desember 20x8, Entitas A meminjam uang dari Entitas B sebesar Rp10.000.000 untuk masa pinjaman satu tahun dengan suku bunga 12% per tahun yang dibayarkan setiap tanggal 1 bulan berikutnya. Maka ayat jurnal penyesuaian beban bunga yang dilakukan Entitas A pada tanggal 31 Desember 20x8 adalah sebagai berikut:

D. Beban bunga	Rp100.000
K. Bunga yang masih harus dibayar	Rp100.000

(Rp10.000.000 x 12% = Rp1.200.000 per tahun. Maka beban bunga per bulan adalah Rp100.000).

- B. Pendapatan yang masih harus diterima adalah pendapatan yang terjadi dalam periode laporan keuangan namun jumlah tersebut belum dilunasi pelanggan.

Contoh 1:

Pada tanggal 1 Desember 20x8, Entitas A menyewakan ruangan kepada Entitas B dengan pembayaran sewa bulanan sebesar Rp1.000.000 yang dibayarkan setiap tanggal 1 bulan berikutnya. Maka ayat jurnal penyesuaian pendapatan sewa yang dilakukan Entitas A pada tanggal 31 Desember 20x8 adalah sebagai berikut:

D. Pendapatan sewa yang masih harus diterima (piutang sewa)	Rp1.000.000
K. Pendapatan sewa	Rp1.000.000

Contoh 2:

Pada tanggal 1 Desember 20x8, Entitas A meminjamkan uang kepada Entitas B sebesar Rp10.000.000 untuk masa pinjaman satu tahun dengan suku bunga 12% per tahun yang dibayarkan setiap tanggal 1 bulan berikutnya. Maka ayat jurnal penyesuaian beban bunga yang dilakukan Entitas A pada tanggal 31 Desember 20x8 adalah sebagai berikut:

D. Pendapatan bunga yang masih harus diterima (piutang bunga)	Rp100.000
K. Pendapatan bunga	Rp100.000

- C. Jika pembayaran atas pembelian barang atau jasa telah dilakukan entitas sebelum manfaatnya dinikmati oleh entitas, maka entitas dapat mencatat pembayaran tersebut sebagai beban dibayar di muka (aset) (Alternatif-1) atau sebagai beban (Alternatif-2).

Contoh:

Pada tanggal 1 Desember 20x8, Entitas A membayar tunai premi asuransi kendaraan sebesar Rp1.200.000 untuk periode 1 Desember 20x8 sampai 30 November 20X8.

Alternatif-1: Dicatat sebagai beban dibayar di muka (1 Desember 20x8)

D. Asuransi dibayar di muka	Rp1.200.000	
K. Kas		Rp1.200.000

Ayat jurnal penyesuaian untuk Alternatif-1 (31 Desember 20x8)

D. Beban asuransi	Rp100.000	
K. Asuransi dibayar di muka		Rp100.000

Alternatif-2. Dicatat sebagai beban (1 Desember 20x8)

D. Beban asuransi	Rp1.200.000	
K. Kas		Rp1.200.000

Ayat jurnal penyesuaian untuk Alternatif-2 (31 Desember 20x8)

D. Asuransi dibayar di muka	Rp1.100.000	
K. Beban asuransi		Rp1.100.000

- D. Jika pendapatan telah diterima secara tunai sebelum entitas memenuhi kewajibannya kepada pelanggan, maka entitas mencatat penerimaan tersebut sebagai *pendapatan diterima di muka* (liabilitas) (Alternatif-1) atau sebagai pendapatan (Alternatif-2).

Contoh:

Pada tanggal 1 Desember 20x8, Entitas A menerima tunai pembayaran untuk jasa konsultasi selama periode 1 Desember 20x8 sampai 31 Mei 20x8 senilai Rp6.000.000.

Alternatif-1: Dicatat sebagai pendapatan diterima di muka (1 Desember 20x8)

D. Kas	Rp6.000.000	
K. Pendapatan diterima di muka		Rp6.000.000

Ayat jurnal penyesuaian untuk Alternatif-1 (31 Desember 20x8)

D. Pendapatan diterima di muka	Rp1.000.000	
K. Pendapatan		Rp1.000.000

Alternatif-2: Dicatat sebagai pendapatan (1 Desember 20x8)

D. Kas	Rp6.000.000	
K. Pendapatan		Rp6.000.000

Ayat jurnal penyesuaian untuk Alternatif-2 (31 Desember 20x8)

D. Pendapatan	Rp5.000.000	
K. Pendapatan diterima di muka		Rp5.000.000

- E. Pembebanan persediaan barang dagang oleh entitas dapat dilakukan saat penjualan (metode perpetual) atau saat akhir periode pelaporan (metode periodik). Entitas dapat memilih rumus biaya masuk-pertama keluar-pertama (MPKP) atau rata-rata tertimbang untuk menentukan nilai persediaan akhir dan harga pokok penjualan (HPP).

Contoh:

Pada tanggal 1 Desember 20x8, Entitas A tidak memiliki saldo persediaan. Pada tanggal 5 Desember 20x8, Entitas A membeli 1.000 unit persediaan pada biaya perolehan Rp1.000 per unit. Pada tanggal 10 Desember 20x8, Entitas A membeli 1.000 unit persediaan pada biaya perolehan Rp1.100 per unit. Pada tanggal 15 Desember 20x8, Entitas A menjual 1.000 unit persediaan dengan harga jual Rp1.500 per unit secara tunai.

Metode MPKP-Perpetual

Metode ini mengasumsikan barang dalam persediaan yang pertama dibeli akan dijual atau digunakan terlebih dahulu sehingga yang tertinggal dalam persediaan akhir adalah yang dibeli atau diproduksi kemudian, serta HPP dicatat saat transaksi penjualan. Pencatatan saat terjadi penjualan:

15 Des 20x8	D. Kas	Rp1.500.000		
	K. Penjualan		Rp1.500.000	[= Rp1.500 x 1.000]

15 Des 20x8	D. HPP	Rp1.000.000		
	K. Persediaan		Rp1.000.000	[= Rp1.000 x 1.000]

Metode Rata-Rata Tertimbang-Perpetual

Metode ini mengasumsikan biaya setiap barang ditentukan berdasarkan biaya rata-rata tertimbang persediaan awal periode dan persediaan yang dibeli atau diproduksi selama periode, serta HPP dicatat saat transaksi penjualan. Pencatatan saat terjadi penjualan:

15 Des 20x8	D. Kas	Rp1.500.000		
	K. Penjualan		Rp1.500.000	[= Rp1.500 x 1.000]

15 Des 20x8	D. HPP	Rp1.050.000		
	K. Persediaan		Rp1.050.000	[= Rp1.050* x 1.000]

* $Rp1.050 = \{(Rp1.000 \times 1.000) + (Rp1.100 \times 1.000)\} / (1.000 + 1.000)$

Metode Periodik

Dengan metode periodik, HPP dihitung dan dicatat entitas pada akhir periode pelaporan.

Untuk persediaan barang dagang, HPP dihitung dengan formula sebagai berikut:

Persediaan awal	xxx
(+) Pembelian	xxx
(-) Persediaan akhir	(xxx)
(=) HPP	xxx

Nilai persediaan akhir yang digunakan bergantung pada rumus biaya yang digunakan.

Dengan rumus MPKP maka nilai persediaan akhir diasumsikan adalah nilai pembelian terakhir. Sementara itu dengan rumus rata-rata, nilai persediaan akhir adalah nilai pembelian rata-rata. Pada contoh di atas sebagai berikut:

Rumus biaya MPKP – periodik		Metode rata-rata tertimbang – periodik	
Persediaan awal	Rp –	Persediaan awal	Rp –
(+) Pembelian	Rp2.100.000	(+) Pembelian	Rp2.100.000
(-) Persediaan akhir	<u>(Rp1.100.000)</u>	(-) Persediaan akhir	<u>(Rp1.050.000)</u>
(=) HPP	Rp1.000.000	(=) HPP	Rp1.050.000
<u>Ayat jurnal penyesuaian (31 Desember 20x8):</u>		<u>Ayat jurnal penyesuaian (31 Desember 20x8):</u>	
D. HPP	Rp1.000.000	D. HPP	Rp1.050.000
K. Persediaan	Rp1.000.000	K. Persediaan	Rp1.050.000

- F. Entitas yang menerapkan ED SAK EMKM dapat memilih metode penyusutan tetap (a) garis lurus, atau (b) saldo menurun. Umur penyusutan mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku.

Contoh:

Pada tanggal 1 Desember 20x8, Entitas A membeli sebuah furnitur kayu yang dicatat sebagai aset tetap. Biaya perolehan aset adalah Rp4.800.000. Umur penyusutan furnitur kayu tersebut menurut ketentuan perpajakan di Indonesia adalah 4 tahun (48 bulan).

Alternatif-1. Metode garis lurus

Tarif penyusutan tahun ke-1 = $100\% / 4 \text{ tahun} = 25\%$

Beban penyusutan tahun ke-1 = $Rp4.800.000 \times 25\% = Rp1.200.000$

Beban penyusutan bulan Desember 20x8 = $1/12 \times Rp1.200.000 = Rp100.000$

Ayat jurnal penyesuaian untuk Alternatif-1 (31 Desember 20x8)

D. Beban penyusutan furnitur Rp100.000
 K. Akumulasi penyusutan furnitur Rp100.000

Alternatif-2. Metode saldo menurun

Tarif penyusutan tahun ke-1 = $100\% / 4 \text{ tahun} = 25\% \times 2 = 50\%$

Beban penyusutan tahun ke-1 = $Rp4.800.000 \times 50\% = Rp2.400.000$

Beban penyusutan bulan Desember 20x8 = $1/12 \times Rp2.400.000 = Rp200.000$

Ayat jurnal penyesuaian untuk Alternatif-2 (31 Desember 20x8)

D. Beban penyusutan furnitur Rp200.000
 K. Akumulasi penyusutan furnitur Rp200.000

G. Aset takberwujud yang perolehannya tidak dapat dipisahkan dengan perolehan aset tetap.

Contoh:

Entitas membeli perangkat komputer, termasuk lisensi penggunaan perangkat lunak (*software*) untuk 4 tahun. Biaya perolehan komputer dan perangkat lunak tersebut masing-masing Rp1.800.000 dan Rp200.000. Umur manfaat perangkat komputer ditetapkan entitas adalah 4 tahun.

Perlakuan akuntansi – pengakuan awal:

Entitas mencatat perangkat lunak sebagai bagian dari aset tetap dengan biaya perolehan aset tetap sebesar Rp2.000.000 (Rp1.800.000 ditambahkan dengan Rp200.000).

Perlakuan akuntansi – pengukuran setelah pengakuan awal:

Aset tetap disusutkan berdasarkan umur manfaat dan metode penyusutan perangkat komputer.

H. Aset takberwujud yang diperoleh secara terpisah.

Contoh:

Entitas telah memiliki perangkat komputer. Seiring dengan perkembangan usaha, entitas membeli lisensi perangkat lunak akuntansi dengan harga perolehan sebesar Rp500.000 yang dapat digunakan selama 5 tahun.

Perlakuan akuntansi – pengakuan awal:

Entitas mencatat perolehan perangkat lunak akuntansi sebagai beban dibayar di muka sebesar Rp500.000, dengan jurnal sebagai berikut:

D. Beban dibayar di muka – perangkat lunak akuntansi	Rp500.000	
K. Kas		Rp500.000

Perlakuan akuntansi – pengukuran setelah pengakuan awal:

Amortisasi perangkat lunak akuntansi pada akhir periode tahun pertama adalah Rp100.000 (Rp500.000 dibagi dengan 5 tahun) dengan jurnal sebagai berikut:

D. Beban Amortisasi – perangkat lunak akuntansi	Rp100.000	
K. Beban dibayar di muka – perangkat lunak akuntansi		Rp100.000

CONTOH LAIN-LAIN

I. Deposito

Contoh:

Entitas membuka deposito pada Bank ABC dengan setoran sebesar Rp10.000.000.

Entitas mencatat ayat jurnal sebagai berikut:

D. Deposito pada Bank ABC	Rp10.000.000	
K. Kas		Rp10.000.000

Pada saat jatuh tempo, entitas mencairkan deposito tersebut dan memperoleh bunga sebesar Rp500.000.

D. Kas	Rp10.500.000	
K. Penghasilan lain-lain		Rp500.000
K. Deposito pada Bank ABC		Rp10.000.000

J. Hibah Pemerintah

Contoh:

Melalui program bantuan dana dari Pemerintah, pada tanggal 10 Oktober entitas menerima dana hibah sebesar Rp18.000.000 yang akan digunakan untuk menambah modal usaha aksesoris handphone.

Pada tanggal 10 Oktober, entitas mencatat ayat jurnal sebagai berikut:

D. Kas	Rp18.000.000	
K. Penghasilan dari Hibah Pemerintah		Rp18.000.000

DASAR KESIMPULAN

Dasar Kesimpulan berikut melengkapi, namun bukan merupakan bagian dari, ED SAK EMKM.

Latar Belakang

DK01. Dasar Kesimpulan ini memberikan ringkasan pertimbangan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) dalam menyusun ED SAK EMKM.

DK02. ED SAK EMKM disusun untuk mendorong dan memfasilitasi usaha mikro, kecil, dan menengah dalam menyusun laporan keuangan. Rerangka pelaporan keuangan ED SAK EMKM membantu entitas dalam melakukan transisi dari pelaporan keuangan yang berdasar kas ke pelaporan keuangan dengan dasar akrual. ED SAK EMKM juga membantu entitas untuk dapat menerapkan SAK lain yang lebih komprehensif, seiring dengan perkembangan ukuran dan kompleksitas transaksi bisnis yang dilakukan entitas tersebut.

DK03. Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro mensyaratkan agar lembaga keuangan mikro melakukan dan memelihara pencatatan dan/atau pembukuan keuangan yang sesuai dengan SAK yang berlaku. Untuk memenuhi amanah di atas, DSAK IAI menyusun SAK yang:

- (a) Konsisten dengan pilar standar akuntansi keuangan yang ada;
- (b) Mencerminkan perkembangan terkini mengenai operasi bisnis dan transaksi yang dilakukan oleh entitas secara umum;
- (c) Menyeimbangkan prinsip akuntansi yang sesuai dengan ukuran, kompleksitas, kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan; dan
- (d) Berdasarkan prinsip efektivitas biaya.

Ruang Lingkup

DK04. ED SAK EMKM diterapkan oleh entitas yang memenuhi kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Entitas yang memiliki akuntabilitas publik yang signifikan di sektor jasa keuangan dapat menerapkan ED SAK EMKM jika diizinkan oleh otoritas di bidang jasa keuangan.

DK05. Entitas yang masuk dalam ruang lingkup ED SAK EMKM adalah entitas yang memenuhi seluruh kriteria maupun karakteristik sebagai berikut:

- (a) Definisi ETAP sebagaimana diatur dalam Bab 1 Ruang Lingkup dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).
- (b) Bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar (bukan merupakan entitas anak dan entitas asosiasi) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 UU No 20 Tahun 2008.
- (c) Rentang kuantitatif sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 dalam UU No 20 Tahun 2008, bahwa kriteria UMKM adalah sebagai berikut:
 - i. Usaha Mikro: memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) paling banyak Rp50.000.000 atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000;

- ii. Usaha Kecil: memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) antara Rp50.000.000 dan Rp500.000.000 atau memiliki hasil penjualan tahunan antara Rp300.000.000 dan Rp2.500.000.000;
 - iii. Usaha Menengah: memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) antara Rp500.000.000 dan Rp10.000.000.000 atau memiliki hasil penjualan tahunan antara Rp2.500.000.000 dan Rp50.000.000.000.
- (d) Tidak memiliki dan/atau menguasai UMKM mitra usahanya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 35 UU No 20 Tahun 2008.

DK06. Entitas harus memenuhi seluruh kriteria sebagaimana dalam DK04, kecuali untuk entitas yang baru pertama kali didirikan, setidaknya selama 2 tahun berturut-turut, dengan pertimbangan bahwa pemenuhan kriteria tersebut tidak bersifat temporer, dan bahwa entitas tersebut memang memiliki kriteria yang sesuai dengan intensi awal DSAK IAI dalam menyusun ED SAK EMKM ini.

DK07. Selain kriteria yang wajib dipenuhi, entitas yang masuk dalam ruang lingkup ED SAK EMKM dapat:

- (a) menerima hibah dan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 21 UU No 20 Tahun 2008;
- (b) menyelenggarakan usaha dengan modal patungan (*joint venture*) dengan pihak asing sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 32 UU No 20 Tahun 2008; dan
- (c) memiliki saham milik Usaha Besar yang terdaftar di Bursa Efek sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 UU No 20 Tahun 2008.

Asumsi Dasar

DK08. Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah dasar akrual dan kelangsungan usaha. Laporan keuangan tidak disusun dengan dasar kas karena informasi keuangan yang dihasilkan akan menjadi tidak relevan dengan tujuan laporan keuangan sebagaimana dijelaskan dalam Bab 2 paragraf 2.1.

DK09. Komponen laporan keuangan ED SAK EMKM tidak meliputi laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas karena:

- (a) Pengguna laporan keuangan yang terbatas;
- (b) Relevansi informasi yang dihasilkan oleh laporan keuangan;
- (c) Pertimbangan kemudahan dalam penerapan pengaturan ED SAK EMKM.

Penentuan Kebijakan Akuntansi

DK10. Entitas yang memiliki transaksi yang tidak secara spesifik diatur dalam ED SAK EMKM ini disyaratkan untuk hanya mengacu kepada Bab 2 *Konsep dan Prinsip Pervasif* dalam ED SAK EMKM ini untuk menentukan kebijakan akuntansinya. Oleh karena itu, entitas tidak disyaratkan untuk mengacu kepada SAK lain karena persyaratan yang diatur dalam SAK lain tersebut mungkin tidak konsisten dengan persyaratan dan pengaturan yang ada dalam ED SAK EMKM ini.

Konsep Retranslasi

DK11. Untuk tujuan kemudahan, ED SAK EMKM tidak mensyaratkan entitas untuk melakukan retranslasi atas aset dan liabilitas moneter yang didenominasi dalam mata uang asing pada akhir periode pelaporan. Dengan demikian, pada akhir periode pelaporan entitas mengukur transaksi yang didenominasi dalam mata uang asing tersebut pada biaya perolehan historis dengan menggunakan kurs tunai pada tanggal transaksi.

Ketentuan Transisi – Nilai Wajar atau Revaluasi sebagai Biaya Perolehan (*deemed cost*)

DK12. ED SAK EMKM mensyaratkan agar entitas menerapkan dasar pengukuran dengan menggunakan metode biaya historis. Biaya historis berarti seluruh aset, liabilitas, dan ekuitas tidak diukur pada nilai wajar atau jumlah revaluasian. Oleh karena itu, ED SAK EMKM ini memberikan pengecualian transisi.

DK13. Meski ED SAK EMKM dapat dianggap sebagai standar yang paling tidak kompleks, seluruh entitas yang dapat memenuhi persyaratan menggunakan ED SAK EMKM ini tetap mempertimbangkan apakah persyaratan yang diatur dalam ED SAK EMKM ini telah memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas. Entitas dapat menerapkan SAK lain meski entitas memenuhi persyaratan ruang lingkup ED SAK EMKM ini.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Grha Akuntan, Jl Sindanglaya No. 1 Menteng, Jakarta Pusat 10310, Indonesia



(021) 31904232
Fax: (021) 3900016



dsak@iaiglobal.or.id | iai-info@iaiglobal.or.id



www.iaiglobal.or.id